

Turnitin Originality Report

Processed on: 17-Jun-2019 17:49 +07

ID: 1144520016

Word Count: 4261

Submitted: 1

DEKONSTRUKSI STAGNASI
PENEGAKAN HOKUM
PEMBERANTASAN KORUPSI By Siti
Marwiyah

35% match (Internet from 12-Sep-2017)

Similarity Index 42%	Similarity by Source Internet Sources: 37% Publications: 5% Student Papers: 13%
------------------------------------	---

<https://media.neliti.com/media/publications/148705-ID-dekonstruksi-stagnasi-penegakan-hukum-pe.pdf>

1% match (student papers from 04-Jan-2017)

[Submitted to Udayana University on 2017-01-04](#)

1% match (student papers from 03-May-2019)

[Submitted to Sriwijaya University on 2019-05-03](#)

1% match (publications)

[Santoso T., Chandra R., Sinaga A.C., Muhajir M., Mardiah S.. "Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu", Center for International Forestry Research \(CIFOR\), 2011](#)

1% match (student papers from 20-Dec-2018)

[Submitted to Sriwijaya University on 2018-12-20](#)

1% match (student papers from 17-May-2019)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2019-05-17](#)

< 1% match (student papers from 17-Oct-2017)

[Submitted to iGroup on 2017-10-17](#)

< 1% match (Internet from 10-Mar-2019)

<http://www-administrasinegara.blogspot.com/2012/07/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan.html>

< 1% match (Internet from 11-Oct-2017)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59741/Chapter%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=3>

< 1% match (student papers from 20-May-2015)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2015-05-20](#)

< 1% match (student papers from 26-Apr-2019)

[Submitted to Tarumanagara University on 2019-04-26](#)

< 1% match (Internet from 21-Apr-2019)

<http://andromedalubis.blogspot.com/2012/05/kapita-selekta-masalah-politik.html>

< 1% match (Internet from 12-Sep-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/3356-ID-kewenangan-dan-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-penyidikan-dan-penuntu.pdf>

< 1% match (Internet from 27-May-2019)

<https://media.neliti.com/media/publications/281737-mekanisme-penyelesaian-tindak-pidana-kor-3be6b890.pdf>

< 1% match (student papers from 21-Feb-2019)
[Submitted to Universitas International Batam on 2019-02-21](#)

< 1% match (Internet from 18-Dec-2018)
https://issuu.com/koranbarometer/docs/23_desember

< 1% match (student papers from 26-Jan-2019)
[Submitted to Jayabaya University on 2019-01-26](#)

< 1% match (student papers from 03-Dec-2014)
[Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2014-12-03](#)

< 1% match (publications)
[Ahmad Muchlis. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN", FIAT JUSTISIA, 2017](#)

[DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HOKUM PEMBERANTASAN KORUPSI Siti Marwiyah Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No. 84, Surabaya, 60118 Abstract](#) [In the hands of regular law enforcement apparatus, criminals find comfort and peace. Various forms of the efforts made fby the state to revive him. One form of efforts by establishing the Corruption Eradication Commission \(KPK\). Establishment of the Commission by the state can be interpreted, that state law enforcement officials regularly call out loud, that this country shall be saved from the culture of corruption, not only by the Commission, but the role is also legally entrusted to the eradication of](#) Kcoeryrwopotriodns: [corruption, stagnation, state Abstrak Di tangan oknum aparat penegak hukum reguler, koruptor mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Berbagai bentuk upaya dilakukan oleh negara untuk menyadarkannya. Sa/ah satu bentuk upayanya dengan cara mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi \(KPK\). Pendirian KPK oleh negara ini dapat ditafsirkan, bahwa negara memanggil aparat penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa negara ini wajib diselamatkan dari budaya korupsi, bukan semata o/eh KPK, tetapi oleh perannya yang](#) mKaetmaaKnugscei:cpaermabyuerriadnistajusgaandkiboeruripkse, psetracganyaasain, nmeegnajraadipemberanta: korupsi. A. Pendahuluan [Negara pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011](#) Di tengah pergaulan hidup bermasyarakat damnyatakan bahwa uang negara dirampok koruptor bemegara ini, ada seseorang atau sejumlah orang [di pusat dan di daerah. Kemudian dia menekankan](#), yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan pemberantasan korupsi jadi prioritas dan agenda stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehinggautama. Menurutny, tidak adil saat sebagian orang [tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang](#) bekerja keras [untuk](#) meningkatkan ekonomi rakyat, [dan](#) melanggar hukum untuk menghadapi pergaulandi pihak lain ada yang mengorupsinya.3 sosial dan kebutuhan hidupnya, akan tetapi ada [Problem korupsi itu dari waktu ke waktu semakin](#) yang gag al menyesuaikan diri dengan norma-normbaertumpuk-tumpuk. Dari beberapa kasus yang yang berlaku, sehingga digunakanlah cara-cara berhasil dibongkar oleh Komisi Pemberantasan yang menyimpang dan melanggar hukum seperti Korupsi (KPK), beberapa kasus lainnya menyusul korupsi' Korupsi dijadikan sebaqai salah satu pilihanmenuntut dibongkar atau dituntaskan, karena pragmatis untuk memperkaya diri atau diindikasi atau diduga ada penyalahgunaan menyukseskan ambisi-ambisinya di lini kekuasaan [keuangan negara. KPK akhirnya sampai](#) atau politik. 2 [diidentikkan dengan](#) "Kumpulan Perkara Korupsi" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akibat banyaknya pengaduan yang masuk ke [ketika berpidato di depan menteri-menteri di Istana lembaga khusus ini. Menurut Busro Muqoddas', 1 Moh. Fahrni, 2009, Korupsi dan Kerapuhan Negara Huklrn, Jakarta, Aksara Baru, him. 2. 2 Ahmad Faisal, 2011, Kedaulatan Koruptordi Negara Hukum, Jakarta, Nirmana Media, him. 9. 3 Suara Karya, Rampok Teriak Rampol<, 22 Olclobber 2011, akses 27 Oktober 2012. 79 jumlah pengaduan masyarakat terhadap perkara](#) Norma yuridis yang tidak diimplementasikan yang [diduga korupsi yang diterima KPK, atau](#) secara maksimal itu mengakibatkan terjadinya Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK dalam kelemahan fungsi sakral hukum. Hukum yang setahun mencapai 6.000 kasus. esensinya mengandung fungsi kontrol sosial, Jumlah pengaduan kasus penyalahgunaan akhimya gaga! terwujud. Donald Black menyebut kekuasaan yang diduga sebagai korupsi yang terushukum [adalah kontrol sosial dari pemerintah \(law is mengalir pad a KPK itu tidak lepas dari kondisi](#) apagroavtmental social control) sehingga sistem penegak hukum di luar KPK yang sedang [hukum adalah sistem kontrol sosial yang di](#) kehilangan kredibilitas publik. Seandainya mereka [dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan](#) mampu menjalankan perannya sebagai lembaga [proses kontrol sosial tersebut. 5 Friedman juga](#) pemberantas korupsi yang baik dan profesional, [menyebutkan bahwa yang terpenting adalah fungsi](#) maka KPK tidal< akan diposisikan oleh masyarakatdari [hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial](#) seperti itu. (ibarat polisi), [penyelesaian sengketa \(dispute](#) Bukan pekerjaan

ringan bagi KPK yang setiap settlement), [skema distribusi barang dan jasa \(good\)](#) bulannya menerima pengaduan sebanyak itu, distributing scheme), dan pemeliharaan sosial apalagi KPK masih menghadapi kasus-kasus besar (social maintenance).⁶ [dan berat, yang oleh publik dituntut secepatnya bisa](#) Norma yuridis yang idealnya mampu mencegah dituntaskan, seperti kasus Century, Hambalang, atau menanggulangi korupsi akhirnya tidak lebih Gayus, dan lain sebagainya. dari pajangan. Stagnasi penegak hukum regular Selain itu, maraknya kasus korupsi merupakajuga menjadi akar penyebab yang membuat korupsi akar masalah utama yang menjadikan kinerja bukan hanya tidak bisa diberantas, tetapi koruptor institusi pemberantas korupsi mengalami banyak juga semakin cenderung mendapatkan pengakuan ujian atau eksaminasi, baik yang bersifat personal atau kesempatan untuk diberi kemudahan dalam maupun kelembagaan. Korupsi telah menjadi memperluas modus operandinya. Penegakan penyakit laten yang mengakibatkan terjadinya [hukum yang dinodai oleh pilar-pilarnya sendiri juga](#) banyak dan beragam problem di negara ini, mengakibatkan esensi penegakan hukum termasuk problem ujian kinerja aparat penegak tereduksi. hukum. [Esensi itu dapat terbaca dalam konstruksi](#) Mengapa [penegakan hukum](#) pemberantasan pemahaman penegakan hukum (law enforcement) korupsi di ranah aparat penegak hukum regular yang bermaknakan suatu proses dilakukannya (polisi dan jaksa) sampai mengalami stagnasi? [upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-](#) Bagaimana seharusnya dilakukan dekonstruksi [norma hukum secara nyata sebagai pedoman](#) terhadap stagnasi pemberantasan korupsi? [perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang](#) 8. Pembahasan [terbatas atau sempit](#). 1. Stagnasi Penegakan Hukum [Dalam pemahaman makro, proses penegakan](#) Penilaian terhadap kondisi stagnasi yang [hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam](#) menimpa lembaga-lembaga penegak hukum [setiap hubungan hukum. Siapa saja yang](#) regular dapat menggunakan parameter mengenai menjalankan aturan normatif atau melakukan implementasi penegakan hukumnya yang belum [sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan](#) memuaskan, tidak berjalan maksimal, atau [mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang](#) mengandung unsur diskriminasi. Penegakan [berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan](#) hukumnya yang semestinya harus dijalankan atas [aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan non-diskriminasi, dirasakan oleh pencari keadilan masih sebatas prinsip-prinsip "di atas kertas" dan belum terwujud dalam realitas.](#) 4 http://www.kpk.go.id/modues/news/article.php?sto.yid=26_29, akses 6 Oktober 2012. 5 Donald Black, 1976, *The Behavior of Law*, New York, USA, Academic Press, tim. 5-14. 6 Lawrence Friedman, 1984, *American Law, An Introduction*, New York, WW. Norton & Company, him 5a Siti Marwiyah, [Dekonstruksi Stagnasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya](#) diartikan prakteknya, tindakan korupsi bisa dilakukan secara sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu pribadi maupun melibatkan banyak pihak terkait untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu sesuai jalur birokrasi dan distribusi yang disepakati. aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Betapa rumit mengurai akar kejahatan korupsi Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila karena tindakan ini telah berlangsung selama diperlukan, aparat penegak hukum itu bertahun-tahun dan menjadi budaya,' serta modus diperkenankan untuk menggunakan daya paksa'. operandinya juga berjamaah. Sayangnya aparat penegak hukum yang [Praktik korupsi secara berjamaah konon telah](#) seharusnya menjadi pilar utama dalam [membudaya sejak era Orde Baru. Baik pejabat pemberantasan korupsi tidak menjalankan perannya secara maksimal.](#) tingkat tinggi maupun [yang](#) menduduki level rendah Prinsip konstitusional yang belum dijalankan di masyarakat, kalau tidak korupsi seolah dianggap maksimal adalah persamaan derajat dalam [tidak berkuasa. Pengaruh tindakan korupsi telah meluas ke berbagai sektor penting. Misalnya](#) pertanggungjawaban hukum atau kesamaan derajat pendidikan dasar dan menengah, pengadilan tinggi, [di depan hukum \(equality before the law\).](#) Aparat jaminan kesehatan masyarakat, layanan [penegak hukum belum bisa jujur, transparan, dan](#) pengurusan surat-surat penting dan lain-lain. utamanya berpegang teguh terhadap equality Contoh paling sederhana adalah korupsi pembagian [before the law ketiga yang menjadi tersangka atau](#) jatah beras miskin (raskin) yang selama ini terdakwa kasus korupsi adalah pimpinan daerah, berlangsung di kalangan masyarakat menengah ke [pejabat tertentu, atau pengusaha yang berkolusi dengan pejabat daerah dalam penyalahgunaan bawah. Kegiatan subsidi raskin ini diyakini banyak](#) keuangan negara. [pihak rentan adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat kepala desa, kepala dusun, ketua RW](#) Pola perkoncoan antara aparat penegak hukum dan ketua RT. Masing-masing pihak seolah ingin dengan pejabat bermasalah telah mengakibatkan mendapat bagian jatah berlebih, padahal tujuan [prinsip equality before the law yang seharusnya menjadi pijakan](#) penanggulangan korupsi subsidi raskin, sesuai namanya, adalah untuk mengalami stagnasi. Korupsi memang sudah membangkitkan ekonomi masyarakat miskin. 10 menjadi penyakit sosial di negara-negara [Salah satu tantangan terpenting yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjadi negara maju yang makmur](#) berkembang [dan](#) sangat sulit diberantas akibat dan adil adalah menanggulangi korupsi yang sudah pemberantasnya juga

bermasalah. Untuk melakukan menggerogoti lembaga eksekutif, legislatif, dan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat yudikatif.¹¹ [banyak hambatannya, termasuk hambatan dari internal penegak hukumnya Korupsi jelas merupakan kejahatan moral yang paling mengkhawatirkan di setiap negara dan perlu](#) Bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan penanganannya serius agar tidak mengganggu oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara kestabilan ekonomi satu bangsa. Bahkan agama ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagipun mewajibkan setiap pemimpin mampu bersikap dihilangkan. Kenyataannya memang tidak ada suatu amanah dan tidak khianat terhadap kepercayaan [negara di dunia ini yang memiliki indeks persepsi](#) kaum yang dipimpin. Bisa jadi para pelaku korupsi [korupsi \(IPK\) yang berada di dalam angka mutlak telah lupa untuk apa mereka dipilih dan diberi](#) 10, paling banter adalah mendekati angka mutlak kepercayaan. Sedangkan untuk itu korupsi adalah [tersebut. a Dal am berbagai artikel yang beredar di](#) kriminalitas yang penanganannya melibatkan [internet, korupsi idenlik dengan tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan banyak pihak.](#)¹² Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang jabatan untuk keuntungan pribadi. Dalam [sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan 7 Saqlpto Rahardjo, 2009, Hukllll Progreslf Sebuah Sintesa Huklll1 Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing. 8 Nur Syam, Penyebab Korups., http://nursyam.sunan-a-el.ac.id/?p::526, d1 akses 28 Oktober 2012. 9 Ahmad Zaki, Korups, adalah Tindakan Krminal yang Melanggar Kepercayaan Rakyat, http://logalooqi.com/korupsi-adalah/, diakses tanggal 28 Oktober 2012 11 Ibid. 12 Thee KianW1e, Menanggulang, KorupsidilIndonesia, Kompas, 5November2012, him 6 NurSyam, Op.CJL 81](#) hukum, bahkan merupakan tolok ukur keberhasilan investigasi dan persidangannya berjalan lambat suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat tinggi mencapai tataran kasus tidak jelas arahnya. penting dari penegakan hukum dalam suatu negara Masyarakat atau aparat penegak hukum juga adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi diingatkan oleh Artikel 6 UDHR (Universal merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, [Declaration of Human Rights](#)), [bahwa dimana pun, permanen dan merusak semua sendi kehidupan semua orang berhak untuk mendapat pengakuan](#) berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian sebagai seseorang di depan hukum (recognition serta penataan ruang wilayah.¹³ [everywhere as a person before the law](#)), [atau](#) "Kerusakan umat (bangsa) terdahulu adalah siapapun yang diduga bersalah, wajib diperlakukan akibat ketika yang bersalah itu orang besar (berduistecara egaliter. Sayangnya, prinsip ini seringkali dan berkuasa), ia dilepaskan dari sanksi hukuman, terganjal atau ikut mengalami stagnasi akibat sedangkan ketika yang bersalah itu orang miskin, ikaehebatan koruptor dan terkerangkengnya dengan gampang dikenai sanksi hukuman, sebagian oknum aparat penegak hukum dalam andaikan puteriku Fatimah mencuri, maka akan menjalankan perannya. kupotong tanqannya", demikian sabda Nabi [Dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999](#) Muhammad SAW, saat ada segolongan orang tentang Hak Asasi Manusia juga diingatkan, bahwa bermaksud memintakan dispensasi hukuman pada setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk seorang pencuri dan kalangan (suku) elitis dan [memperoleh keadilan dengan mengajukan](#) terpendang." [permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam](#) Sumber [hukum](#) itu menunjukkan, bahwa rusak per [diadili melalui proses peradilan yang bebas dan](#) kondisi penerapan hukumnya. Ketika praktik [tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang](#) hukumnya diskriminatif, mengistimewakan yang menjamin pemeriksaan yang [obyektif oleh hakim](#) ber [jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang kolega-koleganya, sementara kelompok lain yang](#) adil dan benar. [tidak mempunyai akses kekuasaan atau bukan](#) Baik dalam konstitusi, UDHR hingga ke UHAM keluarganya menjadi obyek utama penerapannya, sudah jelas di ariskan tentang kewajibang maka bangsa itu akan rusak dan semakin menghormati prinsip egaliter dalam penegakan terperosok menuju kehancuran.¹⁵ [hukum, dan bukan prinsip terbang pilih. Pola terbang Secara moral, itu suatu tuntutan supaya politik pilih dalam](#) penegakan hukum merupakan bentuk terbang pilih tidak dibertakukan dalam manajemen pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran HAM, penanganan per [memanusiakan dan progresif. Keadilan wajib](#) 11 negara ini. [menjadi milik semua etnis, golongan, atau kelas](#) Keistimewaan yang dimiliki koruptor telah sosial apapun. Keadilan ini bisa terwujud dengan membuat tidak gampangnya kekuatan lain seperti jalan tiadanya perbedaan dalam memperlakukan [aparat penegak hukum reguler yang berdiri di garis](#) orang yang sedang berper [pemberantasnya.](#)" ¹³

komitmen tinggi dalam KPK telah menjadi lembaga strategis yang penegakan hukum, justru terlibat dalam perkara dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini dalam mengamankan atau memberi jalan licin (mulus) baguipaya penanggulangan korupsi. KPK telah menjadi koruptor? Atau masih pantaskah Indonesia bergelar lembaga pilihan diantara lembaga-lembaga negara hukum kalau aparatnya terjebak dalam penegakan hukum lainnya. Meskipun lembaga ini lingkaran setan sebagai aparat penghalal dibutuhkan oleh masyarakat dan faktanya di satu malapraktik profesinya? sudah menunjukkan kinerja keras dalam menjaring Gejala belakangan ini dapat terbaca, bahwa koruptor, namun perannya dalam penanggulangan keinginan negara (pemerintah) untuk memerangi koruptor dinilai oleh banyak pihak masih belum korupsi juga dihadapkan pada kepiawaian atau maksimal. "profesionalisme" koruptor itu. Bahkan kondisi ini Berdirinya KPK di tengah badai korupsi di terasa lebih kuat atau "superoritas" dibandingkan Indonesia bukanlah tanpa alasan. KPK dibentuk kemampuan aparat. Aparat yang seharusnya bisa atas dasar lembaga-lembaga utama penegak mengerahkan segala bentuk senjatanya dalam keadilan (Polisi, Jaksa) yang tidak mampu memaksimalkan bekerjanya sistem peradilan menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. pidana (criminal justice system) dalam perkara Sehingga status KPK dianggap "darurat," yakni korupsi, sedang menghadapi tembok besar yang mengambil alih sementara peran lembaga-lembaga membuatnya kehilangan keberdayaannya, yang utama penegak keadilan. tembok tebal ini bersumber dari dirinya sendiri. Status inilah yang semestinya dijadikan momen Peran utamanya sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi hingga akar-akarnya. bergeser menjadi penegak kepentingan seseorang Segenap elemen bangsa telah sepakat menjadikan atau sekelompok orang, yang dinilai memberikan korupsi sebagai extra-ordinary crime. Maka, keuntungan, baik dalam bentuk materi maupun nonkeberadaan KPK yang merupakan manifestasi materi. Sudah tidak sedikit aparat penegak hukum extra-ordinary force, atau bahkan semacam yang berurusan dengan hukum akibat tertangkap superboby, perlu mendapat dukungan penuh.21 tangan (haterdaad) menerima suap atau lainnya. Baratnya, "lilin kecil yang dinyalakan KPK telah Salah satu akar stagnasi penanggulangan korupsi memunculkan secercah titik terang di tengah ini secara tidak langsung pernah diingatkan oleh gelapnya pemberantasan korupsi di Indonesia. filosof Aristoteles "semakin tinggi penghargaan Sekarang, terserah pihak eksekutif, legislatif, manusia terhadap kekayaan, maka semakin yudikatif, dan seluruh komponen bangsa, apakah rendah/ah penghargaan manusia terhadap lilin tersebut akan dibiarkan menyala sendirian?" kesusilaan, kebenaran, dan keadilan. 20 PemyataanUjar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode Aristoteles ini menunjukkan akar kausalitas, bahwa 2003-2007, Taufiqurrahman Rukie, sehingga tidak stagnasi dalam penanggulangan korupsi tidak salah jika Masdar Hilmy mengungkap dalam terlepas dari faktor keserakahan oknum aparat tulisannya, "selamat datang di medan perang suci penegak hukum reguler yang tergiur mendapatkan (holy war) yang sesungguhnya; perang suci uang berlimpah dari koruptor. melawan korupsi. (Kompas, Senin 17 November 2. Opsi Membangun Militansi KPK merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dengan misi yang sejatinya tidak sebatas memberantas korupsi, tetapi juga membangun 2003)22• Sebutan Indonesia sebagai medan perang suci sebenarnya merupakan penegasan, bahwa di neg ara ini banyak mus uh berbaju dan berkedudukan sebagai orang Indonesia, namun perilakunya tidak kalah dengan penjajah dari negara 19 Ibid,hlm.22 20 21 Abdul Wahid, 2010, Keanfan Bemegara Surabaya, Mah,rsllldo, him 57 <http://cibzennews.suaramerdeka.com!/?opbon=com.conlent&task=v1ew&id=1562>, akses 28 Oktober 22 2012. Ibid. 83 lain yang merampok kekayaan bumi pertiwi.23 itu, bukan hanya KPK sajalah yang perlu Kehadiran KPK sekarang patut dijadikan mencermati doktrin perang suci, tapi juga seluruh momentumpaling diakronistik untuk warga negara indonesia. mengumandangkan panggilan melakukan KPK memang lahir atas keinginan politik dekonstruksi atau pembongkaran/ pemberantasan padernen. Pada saat awal lahimya KPK, dimana korupsi, yang sebenarnya bukan hanya untuk KPK, sebagian anggota parlemen "bersih" berharap tetapi juga untuk seluruh emen bangsa, terutama pemberantasan korupsi ebih intensif, sehinggal lembaga-lembaga strategis seperti kepolisian dan bukan tidak mungkin KPK secara politik dibubarkan kejaksanaan. Betapa tidak, diawali dengan pemecatan atau kewenangan diamputasi melalui tangan dan penahanan seorang Bendahara Umum Partai sebagian anggota parlemen yang "kotor". Di negeri Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkait kasus yang korup atau kotor, pasti banyak pihak yang suap Wisma Atlet, yang kemudian dilanjutkan begitu kaget dan berusaha sekuat daya melawan dengan terungkapnya kasus suap koleganya KPK. Adanya upaya penyempitan atau sendiri, Angelina Sondakh, 24 yang kesemua ini pengurangan peran KPK berkali-kali diindikasikan merupakan produk kinerja KPK, tiba-tiba perkara kalau tidak sedikit lembaga strategis yang kurang korupsi menjadi pusat perhatian publik, khususnya mendukung upaya negara untuk memberantas dari sudut tersangkanya, Berbagai model korupsi korupsi," diangkat oleh KPK ke permukaan, yang sebenarnya Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan diorientasikannya untuk membangkitkan dan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah membumikan militansi aparat penegak hukum, sertakejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat lebih makro mengonstruksi dukungan atau minimai untuk disematkan dalam konteks Indonesia, pengawasan publik supaya ikut mendampingi mengingat daya rusak praktek korupsi telah kinerja aparat penegak

hukum regular dalam mencapai level tinggi. Tidak mengherankan jika memasuki rimba jenis kejahatan penyalahgunaan [hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu](#) kekuasaan." [kondisi sosial ekonomi dan politik yang](#) Dengan terungkapnya kasus koruptor yang memprihatinkan. Indikasinya bisa dilihat dari dikenal sebagai elitis induk koruptor itu, banyak deretan angka kemiskinan yang timbul, besarnya pihak menuntut pada, bahwa mestinya dapat tingkat pengangguran, rendahnya indeks sumber dimanfaatkan KPK untuk memangkas habis akar daya manusia Indonesia, serta rendahnya kualitas [korupsi di Indonesia. Misalnya Angie, sosoknya](#) demokrasi. [dapat menjadi pintu gerbang untuk menjerat oknum-](#) Logis jika untuk menghadapi kejahatan luar oknum koruptor lainnya yang masih bersembunyi. biasa tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun [Jika diraba, agaknya sosok Angie tidak jauh dari](#) 1999 disempumakan kembali dan diubah dengan Joseph Valachi, seorang mafia Amerika keturunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Italia. Dalam kondisi tersudutkan, Valachi berani Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih melanggar sumpah diam dan membuka kedok jahamtenjamin kepastian hukum, menghindari organisasinya di depan Kongres Amerika. Jika KPKkeragaman penafsiran hukum dan memberikan mampu menjadikan Angie layaknya Joseph Valachip,erlindungan [terhadap hak-hak sosial dan ekonomi](#) maka kemungkinan besar bangsa ini dapat berubahmasyarakat, [serta perlakuan secara adil dalam](#) menjadi macanAsia. [memberantas tindak pidana korupsi. 77 Kepastian](#) Memang harus diakui, memberantas korupsi inilah yang pernah disebut Frans Magnis suseno", tidak ubahnya mencerabut pohon bambu dari ujungbahwa [setidaknya ada empat alasan utama orang](#) daunya. Sebab, korupsi telah bermetamorfosis menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) menjadi sebuah ideologi yang mengendap dalam [berdasarkan atas hukum yaitu: \(1\) kepastian hukum,](#) kesadaran kosmologi setiap insan Indonesia. Untuk [\(2\) tuntutan perlakuan yang sama, \(3\) legitimasi](#) 23 Mohammad Ilyas, [Op.Ci~ him. 21. 24](#) <http://citizennews.suaramenleka.COQI, Op.Cil 25 Ahmad faesal, Op.Cit, him. 6-7. 26> [Sedangkan untuk melakukan peranan istimewa, KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti penyelenggara negara dan orang lain yang ada yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan](http://citizennews.suaramenleka.COQI, Op.Cilt 27 Ibid. 28 Franz Magn1S Suseno, 1994, Etika Polttk, Pnnsip-pMSipMoral DasarKenegaraanModem, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, him. 295. Siti Marwiyah, Dekonstruksi Stagnasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi 1. Melibatkan aparat pengak hukum, <a href=) dilakukan oleh [aparatus penegak hukum](#) dan penyelenggara [negara](#); Tindak Pidana Korupsi, bahwa lembaga ini dapat [2. Mendapat perhatian dan meresahkan](#) bertindak mulai dari: [masyarakat; dan/atau](#) 1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang 3. Menyangkut kerugian negara paling [melakukan tindak pidana korupsi; 2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan sedikit Rp. 1.000.000.000 \(satu miliar rupiah\),](#) penuntutan terhadap [tindak pidana korupsi](#); Untuk memerangi [tindak pidana](#) korupsi yang 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi; [dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa 4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.](#) (extra [ordinary crime](#)), maka KPK diberi tambahan Dalam menangani kasus [KPK diberi kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu: 1. Melakukan penyadapan dan merekam kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan](#) pembicaraan; [proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam](#) untuk melarang seseorang berpergian keluar memerangi korupsi. Disamping itu dalam pasal 8 [negeri; 3. Meminta keterangan kepada bank atau ayat \(1\) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,](#) lembaga keuangan lainnya [tentang](#) keadaan [KPK](#) diberi kewenangan untuk melakukan keuangan tersangka atau terdakwa yang [pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap](#) sedang diperiksa; [instansi yang menjalankan tugas dan wewenang 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan keuangan lainnya untuk memblokir rekening](#) instansi yang dalam melaksanakan pelayanan [yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,](#) publik. Selanjutnya KPK mengambil alih kasus [terdakwa, atau pihak lain yang terkait; korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila: 5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan](#) 1. laporan masyarakat mengenai tindak [tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; pidana korupsi tidak ditinjaulanjuti; 6. Menghentikan sementara suatu transaksi](#) 2. Proses penanganan tindak pidana [keuangan, transaksi perdagangan, dan korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-laruU tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung perjanjian lainnya atau pencabutan sementara](#) jawaban; [perizinan, lisensi serta konsesi yang 3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal](#) untuk melindungi pelaku korupsi yang [yang cukup ada hubungannya dengan tindak](#) sesungguhnya; 4. Penanganan tindak pidanakorupsi [pidana korupsi yang sedang diperiksa;](#) mengandung unsur korupsi; [7. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau](#) 5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana [instansi penegak hukum negara lain](#) u tu kn [melakukan pencarian, penangkapan, dan korupsi karena campur tangan dari eksekutif,](#) penyitaan barang bukti diluar negeri; [yudikatif atau legislatif; atau 6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan](#) 8. Meminta bantuan [kepolisian atau](#) instansi lain kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak yang terkait untuk

melakukan penangkapan, pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik [penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang](#) dan dapat dipertanggungjawabkan. [sedang ditangani](#). Dalam [Pasal 11 Undang-Undang](#) Dengan kewenangan KPK, tidak heran kalau Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kewenangankalangan [hukum menyebutnya sebagai](#) embagal berikut: [super \(superbody\).](#) [Disamping itu, peranan KPK 85 melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana](#) militansi aparat penegak hukum reguler yang Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan sedang terkena penyakit stagnasi dalam konstruksi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan politik pemberantasan korupsi supaya mereka Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana "menemukan jalan" yang benar. korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Berdasarkan uraian tersebut, maka sebaiknya Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang tantangan n gara itu dijawab oleh aparat penegake mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya mainhukum reguler. Mereka harus menyadarkan dirinya mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan sendiri dengan mengonstruksi integritas moral kewenangan yang bersifat istimewa dan super profetisnya guna menghadapi berbagai bentuk ujian tersebut KPK diharapkan mampu mengeliminasi yang dilancarkan secara bergeleombang, berlapis- korupsi secara konseptual dan sistematis. lapis, dan bahkan barangkali secara masif oleh [Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK](#) koruptor. [berkaitan dengan kurangnya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.](#) "Memahami peran KPK yang istimewa dan DAFTAR PUSTAKA [strategis tersebut, dapat ditafsirkan secara a contrario, bahwa negara sedang atau telah](#) Buku-buku [mengonstruksi politik penanggulangan korupsi](#) Abdul Wahid, 2010, Kearifan Bernegara, [secara terintegratif dengan cara menyadarkan sikap](#) Surabaya: Mahirsindo. [dan perilaku atau kinerja aparat penegak hukum](#) Ahmad Faisal, 2011, Kedaulatan Koruptor di Negara reguler yang selama ini sudah terjangkit penyakit Hukum, Jakarta: Nirmana Media. stagnasi. Negara mengidealisasikan terjadinya Bambang Satriya, 2012, Hukum Indonesia masih di kompetisi aktif dalam penanggulangan korupsi Simpang Jalan, Jakarta: Nirmana Media. dengan cara membangun jaksa atau polisi yang Donald Black, 1976, The Behaviour of Law, New sedang "tertidur lelap" guna mengonstruksi sikap York USA: Academic Press. dan perilaku militansinya dalam berjihad total Franz Magnis Suseno, 1994, Etika Politik; Prinsip- melawan korupsi. Negara memanggil aparat prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. negara ini wajib diselamatkannya, bukan semata Khulnimatul Mas'udah, 2011, Islam Memberi oleh KPK, tetapi oleh perannya yang memang Jawaban terhadap Korupsi, Surabaya: [secara yuridis juga diberi kepercayaan menjadi](#) Mimbar Dakwah. [pemberantas korupsi. Lawrence Friedman, 1984, American Law, An Introduction, New York: W.W. Norton & Company, Moh. Fahrni, 2009, Korupsi dan Kerapuhan Negara Hukum, Jakarta: Aksara Baru, Mohammad Ilyas, 2011, Khittah Negara Hukum dan](#) C. Simpulan dan Saran Politik Pemberantasan Korupsi, [Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh](#) Jakarta: Global Pressindo. [negara untuk menanggulangi korupsi. Salah satu Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif:](#) upayanya adalah menyembuhkan atau [Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, menyadarkan lembaga-lembaga penegakan hukum](#) Yogyakarta: Genta Publishing. [yang sedang terjangkit penyakit menyalahgunakan kewenangan, peran, atau jabatan. Akibat penyakit ini, penanggulangan korupsi mengalami stagnasi. Eksistensi diharapkan mampu menjadi jawaban. Artinya KPK merupakan lembaga yang dibentuk](#) Koran/Majalah/Internet [secara khusus oleh negara dengan misi yang](#) Ahmad Zaki, Korupsi adalah Tindakan Kriminal [yang sebenarnya tidak sebatas pemberantas korupsi](#) Melanggar Kepercayaan Rakyat, [sebagai penyakit bangsa, tetapi juga membangun](#) <http://oga.loog.i.com/korupsi-ad-al-ah/>, diakses tanggal 28 Oktober 2012. 29 <http://wonkdennayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-lindak-pk-lana-korupsi-di-indonesia/>, diakses 28 Oktober 2012. Siti Marwiyah, [Dekonstruksi Stagnasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi](#) <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php> dalam-pemberantasan-tindak-pidana-?storyid=2629, diakses 6 Oktober korupsi-di-indonesia/, diakses 28 Oktober 2012. Oktober 2012. <http://wonkdennayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-lindak-pk-lana-korupsi-di-indonesia/>, diakses 28 Oktober 2012. Nur Syam, Penyebab Korupsi, <http://nursyam.sunan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-ampel.ac.id/?p=526>, diakses 28 Oktober 2012. [dalam pemberantasan tindak pidana-](#) Oktober 2012. [korupsi-di-indonesia/](#), diakses 28 Oktober 2012. [Suara Karya, Rampok Teriak Rampok, 22](#) Oktober 2012. Oktober 2011, diakses 27 Oktober 2012. http://citizennews.suaramerdeka.com/?option=com_content&task=view&id=1562, Thee Kian Wie, Menanggulangi Korupsi di diakses 28 Oktober 2012. Indonesia, Kompas, 5 November <http://wonkdennayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-lindak-pk-lana-korupsi-di-indonesia/>, diakses 28 Oktober 2012. [au an-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-](#) 87 MMH, Ji/id 42 No. 1 Januari 2013 MMH, Ji/id 42 No. 1 Januari 2013 MMH, Ji/id 42 No. 1 Januari 2013 MMH, Ji/id 42 No. 1 Januari 2013 80 82 84 86